

Etika Publik dan Demokrasi di Era FYP: Implementasi Nilai Pancasila Mahasiswa Gen Z dalam Menangkal *Hoaks* pada Pemilihan Umum 2029

Siva Amirzha Ainun Nazwa¹, Natasha Sevinta Rachmad², Nursafira³, Anang Dony Irawan⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Surabaya

*Penulis korespondensi: sivaamirzha65@gmail.com

Abstrak. Perkembangan media sosial yang pesat telah mengubah pola penyebaran informasi politik, khususnya di kalangan Generasi Z. Fenomena FYP (For Your Page) pada platform seperti TikTok, Instagram, dan X mempermudah akses terhadap informasi politik, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran hoaks, propaganda, dan polarisasi menjelang Pemilihan Umum 2029. Mahasiswa sebagai bagian dari Gen Z memiliki peran penting karena aktif menggunakan media digital dan memiliki akses informasi yang luas. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterlibatan mahasiswa dalam menangkali hoaks dan mengurangi polarisasi politik di era digital. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada bagaimana nilai - nilai pendidikan pancasila diaktualisasikan sebagai instrumen etika publik untuk mengatasi disrupsi nilai akibat narasi provokatif di media sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan pengamatan perilaku mahasiswa di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa berperan sebagai agen literasi digital melalui edukasi, klarifikasi informasi, diskusi kritis, dan penyebaran konten yang netral. Namun, rendahnya kemampuan verifikasi informasi serta tingginya konsumsi konten instan masih menjadi tantangan utama dalam menjaga kualitas demokrasi digital.

Kata Kunci: Generasi Z; Etika Politik; Pendidikan Pancasila; Polarisasi Politik.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelang Pemilihan Umum 2029, lanskap politik Indonesia diprediksi akan semakin didominasi oleh interaksi di ruang digital. Generasi Z, yang lahir dan tumbuh bersama teknologi, kini berada di garis depan sebagai konsumen sekaligus produsen informasi utama melalui fitur seperti *For Your Page* (FYP) di TikTok, Instagram Reels, maupun algoritma media sosial lainnya. Namun, kemudahan akses ini membawa tantangan besar, algoritma seringkali menjebak pengguna dalam "ruang gema" (*echo chamber*) yang hanya menyajikan informasi sesuai preferensi pribadi, sehingga memperlebar jurang polarisasi sosial dan mempercepat penyebaran hoaks politik [1]. Urgensi topik ini terletak pada posisi mahasiswa

sebagai kelompok intelektual di dalam Gen Z. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga mampu menjadi penyaring informasi di tengah banjir disinformasi. Jika mahasiswa gagal menjalankan peran ini, demokrasi Indonesia pada 2029 terancam kehilangan substansi diskursus yang sehat dan terjebak dalam sentimen emosional yang memecah belah.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai literasi digital Gen Z cenderung berfokus pada perilaku konsumsi informasi secara umum atau evaluasi Pemilihan Umum yang telah lalu, seperti yang dikaji oleh [2]. Masih terdapat kekosongan riset (*research gap*) dalam literatur yang secara spesifik memetakan strategi preventif mahasiswa dalam menghadapi disrupsi nilai akibat algoritma media sosial yang diproyeksikan untuk Pemilihan Umum masa depan, khususnya Pemilihan Umum 2029. Kebaruan (*novelty*) dari penulisan ini terletak pada integrasi nilai-nilai Pendidikan Pancasila sebagai instrumen etika publik yang praktis guna membendung "polarisasi terarah" di era FYP politik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana dampak algoritma media sosial (era FYP) terhadap potensi polarisasi politik dan penyebaran hoaks di kalangan mahasiswa menjelang Pemilihan Umum 2029?
2. Apa peran dan strategi konkret mahasiswa Gen Z sebagai agen literasi digital dalam menjaga stabilitas demokrasi di ruang siber?

1.3 Tujuan Khusus Riset

Tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan artikel ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh pola konsumsi media sosial terhadap kesadaran politik dan risiko fragmentasi sosial di kalangan generasi muda.
2. Mengidentifikasi kontribusi mahasiswa dalam mengedukasi masyarakat serta melakukan verifikasi informasi guna menangkal narasi hoaks politik menjelang Pemilihan Umum 2029.

1.4 Manfaat Riset

Secara teoritis, riset ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan etika publik di era disrupsi nilai digital. Secara praktis, artikel ini memberikan rekomendasi konkret bagi mahasiswa untuk meningkatkan kedewasaan berpolitik di media sosial, serta bagi institusi perguruan tinggi dalam menyusun strategi penanaman karakter kebangsaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Manfaat Teoritis: Riset ini memperkaya kajian akademik tentang implementasi nilai Sila ke-4 Pancasila dalam konteks era digital [3]. Nilai musyawarah, kebijaksanaan, dan partisipasi demokratis yang terkandung dalam Pancasila diposisikan sebagai pedoman etika publik di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori demokrasi digital yang berlandaskan nilai kebangsaan.

Manfaat Praktis: Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi Gen Z dalam menghadapi tantangan era digital, seperti hoaks, polarisasi, rendahnya literasi digital, dan lemahnya partisipasi politik. Gen Z diarahkan untuk:

- 1) Memperkuat literasi digital etis agar mampu memilah informasi dan menghindari hoaks.

- 2) Membentuk ruang diskusi digital yang terstruktur untuk menumbuhkan budayamusyawarah yang sehat.
- 3) Meningkatkan partisipasi publik melalui forum digital, e-government, dan aspirasiwarga.
- 4) Memanfaatkan teknologi kolaboratif sebagai sarana memperkuat nilai musyawarah dan kebijaksanaan.

Manfaat Sosial: Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan dan pemberdayaan generasi muda agar nilai musyawarah tetap relevan di era digital. Dengan penerapan nilai Sila ke-4 secara konsisten, diharapkan tercipta budaya bermedia sosial yang santun, inklusif, dan berkeadaban, sehingga memperkuat persatuan bangsa dan kualitas demokrasi digital.

1.5 Temuan yang Ditargetkan

Temuan yang ditargetkan melalui penulisan ini adalah sebuah rumusan model perilaku kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) berbasis nilai-nilai Pancasila yang praktis. Model ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi generasi muda dalam mengedukasi lingkungan sekitarnya, menyemai etika publik, serta menjadi formula efektif untuk menyeimbangkan atau meredam narasi provokatif yang tersebar di media sosial menjelang Pemilihan Umum 2029.

Generasi Z memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi Indonesia di era digital, baik melalui penguatan nilai-nilai Pancasila maupun melalui partisipasi politik yang aktif. Temuan yang ditargetkan dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) Gen Z ditargetkan untuk menjadi agen utama dalam menjaga kualitas demokrasi digital dengan menginternalisasi nilai musyawarah (Sila ke-4 Pancasila) [3]. Hal ini diwujudkan melalui kemampuan mereka dalam melakukan verifikasi informasi, menolak hoaks, serta mengedepankan kebijaksanaan dalam berdiskusi di ruang digital. Dengan literasi digital yang etis, Gen Z diharapkan mampu menciptakan ekosistem komunikasi yang santun, inklusif, dan berkeadaban.
- b) Penelitian menargetkan terciptanya forum diskusi daring yang sehat, di mana Gen Z dapat berdialog secara rasional, menghargai perbedaan pendapat, dan mencari mufakat. Hal ini penting untuk menghindari polarisasi opini yang sering muncul di media sosial akibat debat emosional dan ujaran kebencian. Dengan ruang diskusi yang terarah, nilai musyawarah dapat dihidupkan kembali dalam konteks demokrasi digital.
- c) Gen Z tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai aktor politik yang aktif. Mereka ditargetkan untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum sebagai pemilih cerdas, terlibat dalam organisasi masyarakat sipil, serta menginisiasi gerakan sosial melalui media sosial. Aktivisme digital seperti kampanye online, petisi, dan gerakan sosial (#ReformasiDikorupsi, #FridaysForFuture) menjadi bukti nyata bahwa Gen Z mampu membawa isu-isu penting ke ruang publik.
- d) Gen Z ditargetkan untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana kolaborasi positif. Misalnya, penggunaan platform e-government untuk menyampaikan aspirasi, aplikasi edukasi untuk meningkatkan literasi politik, serta media kreatif untuk menyebarkan konten edukatif yang netral. Dengan cara ini, teknologi tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga instrumen penguatan nilai musyawarah dan demokrasi.
- e) Mereka ditargetkan untuk menjadi pelopor demokrasi digital yang beretika, berkeadaban, dan mampu menjaga persatuan bangsa. Karakter ini diwujudkan melalui sikap kritis terhadap informasi, kesadaran sosial tinggi terhadap isu-isu global (perubahan iklim,

keadilan sosial, hak asasi manusia), serta komitmen untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

- f) Penelitian juga menargetkan solusi atas tantangan yang dihadapi Gen Z, seperti rendahnya edukasi politik, ketidakpercayaan terhadap sistem politik, pengaruh radikalisme dan intoleransi di ruang digital, serta kesenjangan akses teknologi. Dengan strategi penguatan literasi digital, pendidikan politik praktis, dan inklusivitas akses teknologi, Gen Z diharapkan mampu mengatasi hambatan tersebut dan berkontribusi secara positif terhadap demokrasi. [4]

Secara keseluruhan, temuan yang ditargetkan dari kedua jurnal adalah terciptanya model kewarganegaraan digital berbasis Pancasila yang diperkuat oleh partisipasi politik Gen Z. Model ini menekankan:

- 1) Verifikasi informasi dan penolakan hoaks.
- 2) Diskusi rasional dan musyawarah digital.
- 3) Aktivisme politik melalui media sosial dan organisasi sipil.
- 4) Pemanfaatan teknologi kolaboratif untuk kepentingan bersama.
- 5) Pembentukan karakter deliberatif yang beretika dan inklusif.

Dengan demikian, Gen Z diposisikan sebagai generasi pelopor demokrasi digital yang tidak hanya menjaga nilai-nilai Pancasila, tetapi juga aktif membangun masa depan politik Indonesia yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

1.6 Demokrasi Digital dan Fenomena FYP (For You Page)

Demokrasi digital merupakan perluasan ruang publik di mana partisipasi politik, diskusi, dan penyebaran informasi beralih ke platform siber. Namun, pemanfaatan teknologi ini membawa disrupsi berupa kehadiran algoritma rekomendasi seperti *For Your Page* (FYP) pada platform TikTok dan Instagram. Algoritma ini bekerja secara otomatis dengan menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi, riwayat tontonan, dan kecenderungan perilaku pengguna. Fenomena ini memicu terbentuknya *Filter Bubble* (gelembung informasi) dan *Echo Chamber* (ruang gema) yang mengisolasi pengguna dari perspektif politik yang berbeda. Praktik komunikasi politik di media sosial saat ini sangat rentan dimanipulasi oleh penyebaran hoaks dan propaganda emosional yang sengaja dirancang untuk memicu fragmentasi sosial. Akibatnya, menjelang Pemilihan Umum 2029, ruang digital tidak lagi menjadi tempat diskusi yang sehat, melainkan menjadi inkubator polarisasi politik yang tajam akibat minimnya perimbangan informasi [5].

Kajian literatur mengenai partisipasi politik Generasi Z dan internalisasi nilai-nilai Pancasila menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan erat dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia di era digital. Generasi Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, merupakan kelompok demografis terbesar dalam Pemilihan Umum dan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi mereka masih tergolong sedang, meskipun jumlah pemilih Gen Z sangat signifikan. Data survei Pilkada 2024 misalnya, menunjukkan partisipasi Gen Z mencapai 67,4% dengan pengaruh nilai-nilai Pancasila sebesar 65,1%. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi landasan moral dalam pengambilan keputusan politik [6].

Dalam konteks pendidikan, fenomena degradasi pemahaman Pancasila di kalangan Gen Z menjadi perhatian serius. Banyak mahasiswa mengetahui Pancasila sebatas hafalan, tetapi belum memahami makna filosofis dan peranannya sebagai dasar negara. Sikap apatis terhadap

isu kewarganegaraan, ancaman ideologi asing, serta kecenderungan individualis dan hedonis akibat pengaruh teknologi digital memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi Islam dilakukan melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan pendekatan kontekstual, pembelajaran interaktif, serta pembahasan isu-isu aktual. Upaya ini bertujuan membentuk *civic intelligence* (kecerdasan warga negara), *civic responsibility* (tanggung jawab warga negara), dan *civic participation* (partisipasi warga negara) agar mahasiswa mampu menjadi good citizens yang kritis, demokratis, dan berkarakter. Media sosial menjadi faktor penting dalam kedua kajian. Di satu sisi, media sosial mempermudah Gen Z memperoleh informasi politik dan menyuarakan aspirasi. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi sarana penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi opini. Hal ini menuntut adanya literasi digital yang kuat agar Gen Z mampu menyeleksi informasi secara bijak dan tidak mudah terprovokasi. Penelitian menegaskan bahwa nilai musyawarah dalam Sila ke-4 Pancasila harus dihidupkan kembali dalam ruang digital, sehingga perbedaan pendapat dapat dikelola dengan dialog rasional, bukan dengan debat emosional yang memecah belah.

Selain itu, pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila untuk melestarikan demokrasi. Pendidikan Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai mata kuliah wajib, tetapi juga sebagai sarana pembentukan identitas moral generasi muda. Dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu menghadapi tantangan globalisasi, menjaga integritas nasional, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini sejalan dengan misi pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pada pengembangan kecerdasan, tanggung jawab, dan partisipasi [7].

1.7 Karakteristik Literasi Digital Mahasiswa Generasi Z

Generasi Z dikenal sebagai *digital natives* yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap arus informasi instan di media sosial. Sebagai kelompok terdidik, mahasiswa memiliki posisi strategis dan akses informasi yang luas untuk menjadi motor penggerak dalam ekosistem digital. Namun, kemudahan akses teknologi ini sering kali tidak berbanding lurus dengan kemampuan menyaring informasi kritis. Menurut [2] mengungkapkan bahwa mengenai mahasiswa Generasi Z menunjukkan adanya tantangan berupa rendahnya kebiasaan verifikasi data dan tingginya konsumsi konten instan, yang membuat mereka rentan terjebak dalam misinformasi. Oleh karena itu, literasi digital bagi mahasiswa tidak boleh hanya dipahami sebagai kecakapan teknis mengoperasikan gawai, melainkan sebuah kecerdasan emosional dan kognitif untuk mengidentifikasi hoaks, mengklarifikasi disinformasi, serta meredam fanatisme politik di ruang publik virtual.

Selain itu, karakteristik literasi digital Generasi Z terlihat dari kemampuan mereka memahami dampak negatif media digital, seperti *cyberbullying*, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks. Kesadaran ini muncul dari pengalaman mereka melihat berbagai kasus di media sosial sehingga mendorong munculnya sikap lebih hati-hati dalam membagikan informasi. Mahasiswa Generasi Z juga menunjukkan adanya kemampuan berpikir kritis dengan mempertimbangkan konsekuensi sebelum mengunggah atau menyebarkan konten digital. Karakteristik lainnya adalah adanya kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas digital. Mahasiswa Generasi Z mulai memahami bahwa setiap aktivitas di internet meninggalkan jejak digital (*digital footprint*) yang dapat memengaruhi masa depan akademik maupun profesional mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha menjaga ucapan, menghargai perbedaan pendapat, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Di samping itu, pembentukan literasi digital mahasiswa Generasi Z juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial seperti keluarga, teman sebaya, guru, dan influencer media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku digital Generasi Z terbentuk melalui proses interaksi sosial dan pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, karakteristik literasi digital mahasiswa Generasi Z tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga kesadaran etika, kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab sosial, serta penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan digital sehari-hari.

1.8 Konsep Pendidikan Pancasila sebagai Instrumen Etika Publik

Pendidikan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya berfungsi sebagai sekumpulan teori formal, melainkan sebagai kompas etis dan moral dalam berperilaku di ruang siber. Ketika nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan ke dalam aktivitas digital, ia bertransformasi menjadi panduan etika publik yang kuat untuk menghadapi disrupsi nilai [8]. Hubungan antara nilai Pancasila dengan peran mahasiswa dalam demokrasi digital bertumpu pada dua prinsip utama:

- 1) Sila ke-3 (Persatuan Indonesia): Sila ini menjadi landasan moral bagi mahasiswa untuk menolak segala bentuk narasi adu domba, hoaks, dan konten provokatif yang berpotensi memecah belah integrasi bangsa di dunia maya. Mencegah polarisasi digital adalah wujud nyata dari upaya merawat persatuan nasional.
- 2) Sila ke-4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan): Sila ini menekankan bahwa partisipasi demokrasi harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan akal sehat, bukan oleh viralitas, jumlah pengikut, atau sentimen emosional semata. Mahasiswa mengimplementasikan nilai ini dengan mengedepankan etika komunikasi yang rasional dan objektif.

Menurut [9] menegaskan bahwa peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara ideal di Indonesia sangat krusial. Melalui penguatan etika publik berbasis Pancasila, kebebasan berekspresi mahasiswa di media sosial akan selalu beriringan dengan tanggung jawab moral untuk menjaga ketertiban umum dan stabilitas demokrasi siber.

1.9 Hasil Temuan Peneliti Lain yang Relevan

Untuk memperkuat orisinalitas dan landasan teoretis penelitian ini, berikut adalah beberapa hasil temuan dari penelitian terdahulu yang relevan dalam rentang waktu lima tahun terakhir:

- 1) [6] : Melalui studinya menyimpulkan bahwa partisipasi aktif Generasi Z dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah merupakan bentuk pengejawantahan dan manifestasi nyata dari penyerapan nilai-nilai ideal demokrasi Pancasila di kehidupan bernegara.
- 2) [10] : Dalam penelitiannya mengenai etika siber mendeteksi terjadinya degradasi nilai kesantunan digital di kalangan Gen Z, seperti maraknya ujaran kebencian (*hate speech*) dan perundungan siber (*cyberbullying*). Riset ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi etika warga digital (*digital citizenship*) yang bersandarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila.
- 3) [11] : Mengidentifikasi bahwa penyebaran hoaks di ruang digital secara masif telah mengikis kedamaian, toleransi, dan rasa saling percaya yang menjadi akar budaya demokrasi Indonesia. Temuan mereka menegaskan bahwa generasi muda wajib mengambil peran aktif sebagai agen penjernih narasi politik dari unsur kebohongan.
- 4) [12] : Menemukan melalui metode survei mahasiswa bahwa pemanfaatan media sosial yang tidak terkontrol sangat rentan memicu penyebaran informasi palsu (*hoax*). Oleh

- karena itu, riset ini membuktikan bahwa penguatan Pendidikan Pancasila sangat efektif sebagai instrumen preventif bagi mahasiswa untuk menyaring berita bohong.
- 5) [13] : Dalam kajiannya tentang pendidikan karakter menekankan bahwa di tengah derasnya arus disrupsi informasi global, penanaman karakter berbasis nilai kebangsaan memiliki urgensi yang sangat tinggi sebagai pilar esensial untuk membentuk kesadaran bela negara di kalangan generasi muda..
 - 6) [14] : Penelitian ini menunjukkan pentingnya pembentukan literasi digital yang adaptif bagi Gen Z untuk membendung penyebaran konten propaganda dan narasi radikal yang memanfaatkan algoritma media sosial
 - 7) [15] : Dalam analisisnya terhadap strategi kampanye Pemilihan Umum 2024 menyimpulkan bahwa media sosial telah bergeser menjadi medan pertempuran utama untuk merebut suara pemilih pemuda. Meskipun demikian, efektivitas kampanye digital tersebut masih dibayangi oleh tantangan berat berupa disinformasi, polarisasi akut, serta isu etika data.
 - 8) [2] : Penelitian mereka menemukan bahwa mahasiswa Gen Z memiliki ketergantungan yang tinggi pada media sosial untuk mencari informasi, namun kemampuan analisis kritis mereka dalam mendeteksi misinformasi masih memerlukan intervensi literasi digital yang intensif.
 - 9) [16] : Dalam studi konseptualnya menegaskan bahwa upaya membangun budaya politik yang demokratis serta memperkuat masyarakat sipil (*civil society*) di Indonesia memerlukan sinergi yang kokoh antara negara dan lembaga pendidikan melalui penguatan landasan pendidikan kewarganegaraan sejak dini.
 - 10) [17] : Dalam penelitiannya mengenai pengaruh TikTok menemukan bahwa platform tersebut telah menjadi arena komunikasi politik baru yang sangat dominan bagi Generasi Z melalui format video pendek. Namun, riset ini menyoroti bahwa popularitas politik di TikTok lebih sering mengeksploitasi aspek emosional pemilih muda dibandingkan dengan membangun rasionalitas berpikir kritis mereka.
 - 11) [7] : Dalam risetnya di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan warga negara yang baik (*good citizenship*) pada Generasi Z dapat dicapai secara optimal melalui model pembelajaran kontekstual dan diskusi interaktif yang mengangkat isu-isu sosial aktual.
 - 12) [3] : Secara spesifik menyoroti peran strategis Gen Z dalam mengimplementasikan Sila ke-4 Pancasila di era digital. Riset ini menyimpulkan bahwa pemuda memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas demokrasi digital melalui pembentukan ruang diskusi virtual yang inklusif, bijaksana, dan etis.
 - 13) [8] : Menjelaskan bahwa di era digital yang penuh dengan disrupsi informasi, penanaman karakter berbasis nilai-nilai kebangsaan menjadi benteng utama agar generasi muda tidak kehilangan identitas moral dan etika publik saat berinteraksi di ruang siber.
 - 14) [5] : Riset ini menyoroti peran pemuda dalam mewujudkan demokrasi digital dan menunjukkan bahwa komunikasi politik di media sosial sangat rentan terhadap manipulasi opini yang memicu perpecahan sosial jika tidak diimbangi oleh kehadiran agen pengontrol yang netral.
 - 15) [4] : Menemukan bahwa pemanfaatan media sosial oleh Generasi Z mampu meningkatkan kesadaran politik mereka secara drastis dalam menyuarakan isu-isu keadilan sosial. Namun, antusiasme yang tinggi ini sering kali terhambat oleh maraknya disinformasi siber serta minimnya pendidikan politik formal yang terstruktur.

2. METODE RISET

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai paling relevan untuk mengeksplorasi, memahami, dan membedah fenomena sosial yang kompleks secara mendalam, yaitu mengenai efektivitas implementasi nilai Pancasila dan etika publik mahasiswa Generasi Z dalam menangkal arus hoaks politik. Subjek utama dalam penulisan ini difokuskan pada mahasiswa Generasi Z sebagai representasi kelompok intelektual muda sekaligus pemilih dominan pada Pemilihan Umum 2029. Sementara itu, objek penelitian yang dikaji secara spesifik adalah dinamika disrupsi nilai, penyebaran hoaks politik, dan gejala polarisasi sosial yang terjadi di berbagai platform media sosial populer berbasis algoritma rekomendasi halaman seperti TikTok, Instagram, dan X. [18]

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sekunder melalui penelusuran dokumen literatur yang kredibel, akurat, dan relevan dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Sumber pustaka yang diidentifikasi mencakup jurnal ilmiah terakreditasi, buku teks Pendidikan Pancasila, etika politik, serta dokumen regulasi resmi terkait ruang siber di Indonesia. Setelah data sekunder terkumpul, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Proses analisis ini berjalan melalui tiga fase yang sistematis, yakni reduksi data untuk menyaring informasi yang paling relevan dengan etika publik digital, penyajian data secara terstruktur sesuai sub-bab, serta penarikan kesimpulan awal untuk memetakan bagaimana nilai Pancasila dapat diaktualisasikan mahasiswa sebagai instrumen preventif Pemilihan Umum.

Guna memastikan objektivitas dan kedalaman analisis, penelitian ini dilaksanakan melalui empat tahapan penelitian yang sistematis dan terencana. Tahap pertama dimulai dengan studi pendahuluan, yaitu melakukan pengamatan terhadap fenomena disrupsi nilai di era FYP politik serta merumuskan urgensi riset. Tahap kedua adalah pengumpulan literatur dan pemetaan *research gap* dari temuan-temuan peneliti terdahulu terkait perilaku digital Gen Z. Tahap ketiga merupakan tahap analisis kritis, di mana penulis mengintegrasikan teori etika publik dan konsep Pendidikan Pancasila (Sila ke-3 dan Sila ke-4) untuk membedah data perilaku serta strategi mahasiswa yang telah ditemukan. Tahap keempat atau tahap akhir adalah penyusunan draf rekomendasi praktis kewarganegaraan digital yang ditargetkan untuk menyongsong Pemilihan Umum 2029. [15]

Fase krusial dalam metodologi ini ditutup dengan proses penyimpulan hasil penelitian yang dilakukan melalui teknik triangulasi sumber pustaka dan penarikan kesimpulan logis induktif. Penyimpulan ini tidak sekadar mengulang poin-poin yang ada pada bab pembahasan, melainkan merangkum inti sari temuan ilmiah yang disinkronkan langsung dengan tujuan khusus penelitian. Melalui proses penyimpulan ini, fakta-fakta mengenai peran mahasiswa sebagai agen literasi disintesis dengan konsep etika publik Pancasila, sehingga menghasilkan sebuah rumusan model perilaku digital (*digital citizenship*) yang solid, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis untuk menjaga stabilitas demokrasi siber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Dampak Algoritma FYP terhadap Disrupsi Nilai dan Polarisasi Politik

Berdasarkan hasil analisis isi terhadap literatur terkini, ditemukan bahwa mekanisme fitur *For Your Page* (FYP) pada media sosial berbasis video pendek telah mengubah lanskap komunikasi politik secara drastis. Algoritma rekomendasi ini bekerja dengan cara merekam retensi data, durasi tontonan, serta interaksi digital pengguna untuk kemudian menyajikan konten sejenis secara terus-menerus. Di satu sisi, sistem ini mempermudah mahasiswa mendapatkan informasi, namun di sisi lain, ia menciptakan ekosistem "polarisasi terarah".

Fenomena ini menggiring pengguna masuk ke dalam gelembung informasi (*filter bubble*) yang memotong perspektif atau sudut pandang politik alternatif. Menjelang Pemilihan Umum 2029, kondisi ini memicu disrupsi nilai-nilai kebangsaan yang masif. Konten politik yang sengaja diproduksi secara bombastis dan emosional (propaganda) sangat mudah menjadi viral karena didorong oleh algoritma tersebut. Sebagaimana yang dikonfirmasi dalam temuan [5] komunikasi politik di media sosial saat ini sangat rentan terhadap eksploitasi dan manipulasi opini publik. Ketika mahasiswa secara konstan hanya disuguhi narasi yang menyudutkan salah satu kubu politik tanpa adanya pertimbangan, maka ruang siber berubah dari wadah diskusi yang sehat menjadi inkubator konflik horizontal yang melahirkan sentimen bahwa "lawan politik adalah musuh bersama".

Peran Generasi Muda dalam Menangkal Hoaks Penelitian pertama menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dengan cara menangkai hoaks politik. Hasil kajian menunjukkan lima strategi utama:

1. Membangun budaya bermedia sosial dengan etika santun, menjauhkan diri dari ujaran kebencian, hujatan, dan fitnah.
2. Menjernihkan narasi politik yang mengandung kebohongan, dengan cara mengedukasi masyarakat melalui konten yang valid dan logis.
3. Menggelorakan semangat nasionalisme, agar politik tidak terjebak pada kepentingan pragmatis yang mengorbankan persatuan bangsa.
4. Melaporkan konten atau akun penyebar hoaks, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat oleh lembaga negara.
5. Bergabung atau membentuk komunitas anti-hoaks, seperti MAFINDO atau Turn Back Hoax, untuk memperkuat gerakan kolektif melawan disinformasi.
6. Strategi ini menegaskan bahwa generasi muda bukan hanya konsumen informasi, tetapi juga agen aktif dalam menjaga integritas demokrasi melalui media sosial. [19]

3.2 Karakteristik Perilaku Digital Mahasiswa Gen Z dan Tantangan Verifikasi

Sebagai generasi *digital native*, mahasiswa memiliki intensitas interaksi yang sangat tinggi dengan gawai dan platform digital. Namun, riset menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara kemampuan operasional teknologi dengan kedewasaan berpikir kritis. Temuan ilmiah dari [2] menegaskan bahwa mahasiswa Generasi Z memiliki kecenderungan tinggi untuk mengonsumsi informasi instan yang tersaji di media sosial, namun kapasitas mereka dalam mendeteksi dan mengklarifikasi misinformasi secara mandiri masih tergolong rendah.

Tantangan utama yang dihadapi mahasiswa menjelang Pemilihan Umum 2029 adalah kebiasaan mengonsumsi konten video pendek berdurasi kurang dari satu menit yang telah dipotong konteksnya demi mengejar viralitas. Keterbatasan waktu tonton ini membuat pesan-pesan politik yang kompleks direduksi menjadi narasi hitam-putih yang dangkal. Rendahnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan fakta (*fact-checking*) lintas platform membuat sebagian mahasiswa tanpa sengaja ikut andil dalam menyebarkan hoaks politik yang melintas di FYP mereka. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital yang dibutuhkan saat ini bukan lagi sekadar pemahaman teknis, melainkan penguatan kecerdasan kognitif dan emosional agar tidak mudah terombang-ambing oleh arus disinformasi [20]. Penelitian kedua menyoroti mahasiswa sebagai kelompok yang paling intens menggunakan media sosial. Hasil survei menunjukkan 87% mahasiswa tidak percaya begitu saja pada berita di media sosial, dan 56,5% selalu memeriksa fakta sebelum menyebarkan informasi. Namun, 50% responden pernah ikut menyebarkan berita, meskipun sebagian besar memastikan kebenarannya terlebih dahulu.

Sebanyak 82,6% responden menganggap penyebaran hoaks relevan dengan tingkat literasi individu, menegaskan pentingnya pendidikan literasi digital.

Pancasila menjadi dasar moral untuk mencegah hoaks. Sila ke-2 (Kemanusiaan yang adil dan beradab) menuntut sikap santun dalam berekspresi, Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) menegaskan pentingnya menjaga persatuan dari ancaman disinformasi, dan Sila ke-5 (Keadilan sosial) menekankan perlunya penegakan hukum terhadap penyebar hoaks. Dengan demikian, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi instrumen penting untuk membentuk mahasiswa yang kritis, bertanggung jawab, dan beretika dalam bermedia sosial. Penguatan Etika Digital Gen Z Berbasis Pancasila Penelitian selanjutnya lebih fokus pada pria Gen Z di Jakarta [10]. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa meskipun mereka memahami pentingnya etika digital, penerapannya masih bersifat individual dan belum sistematis.

Temuan utama: Kesadaran etika digital muncul sejak SMA, terutama setelah menyaksikan kasus cyberbullying dan hoaks. Nilai-nilai Pancasila dianggap relevan sebagai pedoman moral, misalnya menjaga sopan santun dalam berkomentar (Sila ke-2), menghargai perbedaan pendapat (Sila ke-3 dan ke-4), serta tidak menyebarkan informasi palsu (Sila ke-5). Faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk etika digital adalah teman sebaya, keluarga, guru, dan influencer digital. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi ruang utama aktualisasi nilai Pancasila, baik melalui komentar positif, kampanye sosial, maupun konten edukatif. Meskipun kesadaran etika digital sudah ada, perlu ada pendidikan etika digital berbasis Pancasila yang lebih sistematis di sekolah dan komunitas, agar praktik nilai-nilai kebangsaan tidak hanya bersifat personal tetapi juga kolektif. Hasil dan pembahasan menegaskan pentingnya peran Gen Z dalam menangkal hoaks dan memperkuat demokrasi digital melalui nilai-nilai Pancasila. Generasi muda harus membangun budaya bermedia sosial yang santun, kritis, dan bertanggung jawab. Mahasiswa perlu memperkuat literasi digital agar tidak mudah terjebak dalam disinformasi. Gen Z di perkotaan harus menginternalisasi nilai Pancasila secara sistematis dalam perilaku digital, dengan dukungan pendidikan, keluarga, dan komunitas. Dengan demikian, Pancasila tetap relevan sebagai kompas moral dalam menghadapi tantangan era digital, sekaligus menjadi benteng etis untuk menjaga persatuan bangsa dan kualitas demokrasi Indonesia. [12]

3.3 Strategi Konkret Mahasiswa sebagai Agen Etika Publik Digital

Meskipun menghadapi banjir informasi, mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda mulai memformulasikan strategi preventif untuk membendung disrupsi nilai siber melalui tiga peran strategis:

1. Edukasi Pembatasan Disinformasi (*Fact-Checking*): Mahasiswa bertindak sebagai filter digital lini pertama dengan memanfaatkan platform eksternal yang kredibel untuk memverifikasi kebenaran sebuah narasi politik sebelum menyebarkannya ke lingkungan terdekat atau grup percakapan keluarga.
2. Moderasi Diskusi Kritis yang Rasional: Di kolom-kolom komentar media sosial maupun dalam ruang diskusi akademik kampus, mahasiswa berupaya menurunkan tensi perdebatan emosional dengan menyajikan argumen-argumen objektif berbasis data ilmiah guna meredam fanatisme buta antarpengukung.
3. Produksi Konten Edukasi Netral: Mahasiswa memanfaatkan kreativitas digital mereka untuk menyusun infografis atau video edukasi Pemilihan Umum yang objektif. Upaya ini bertujuan untuk merebut ruang FYP agar tidak hanya dikuasai oleh konten propaganda hitam, melainkan diisi oleh diskursus yang mencerahkan secara politik.

Pembentukan karakter berbasis nilai kebangsaan adalah pilar esensial untuk menjaga identitas moral generasi muda di era digital. Dengan menerapkan tiga langkah di atas, mahasiswa secara aktif menolak menjadi konsumen pasif dan bertransformasi menjadi agen yang menyemai kembali etika publik di ruang publik virtual. [14]

3.4 Implementasi Nilai Pancasila dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi Siber

Tindakan preventif dan kritis mahasiswa dalam menghadapi hoaks politik pada dasarnya merupakan bentuk aktualisasi nyata dari "Pancasila yang Hidup" (*Living Pancasila*) di tengah disrupsi teknologi. Praktik etika publik digital ini bersandar secara kuat pada dua prinsip ideologis:

- Aktualisasi Sila ke-3 (Persatuan Indonesia): Ketika mahasiswa menahan diri untuk tidak ikut menyebarkan narasi provokatif, fitnah, atau hoaks yang menyerang identitas tertentu, mereka sedang menjalankan fungsi pertahanan nasional di ruang siber. Tindakan menyaring informasi sebelum membagikannya (*sharing*) adalah upaya konkret untuk mencegah fragmentasi sosial dan menjaga integrasi bangsa dari ancaman perpecahan digital akibat perbedaan pilihan politik.
- Aktualisasi Sila ke-4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan): Sila ini mengisyaratkan bahwa sistem demokrasi Indonesia harus dijalankan atas dasar akal sehat, musyawarah, dan kebijaksanaan, bukan atas dasar asas keviralan atau sentimen emosional massa. Mahasiswa mengimplementasikan nilai ini dengan menolak tunduk pada arus algoritma yang manipulatif. Kebebasan berpendapat di media sosial dijalankan secara bertanggung jawab, dengan menempatkan kebenaran data di atas kepentingan elektoral sesaat.

Dalam sistem demokrasi mesti ada pemilihan umum. Selain ajang untuk mencari Pemerintahan baru pemilihan umum merupakan bukti keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin [21]. Melalui integrasi nilai Pancasila ke dalam perilaku berinternet, mahasiswa berhasil membangun sebuah model kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) yang kokoh. Model ini membuktikan bahwa moralitas kebangsaan mampu menjadi benteng etis yang efektif dalam menghadapi Pemilihan Umum modern, sehingga stabilitas demokrasi Indonesia menjelang Pemilihan Umum 2029 tetap dapat dirawat dengan semangat persaudaraan sejati. [13]

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan rangkaian pelaksanaan riset yang telah dilakukan melalui studi pustaka kritis, penulisan ini berhasil menjawab tujuan khusus yang diajukan sejak awal. Pertama, ditemukan bahwa mekanisme algoritma halaman seperti *For Your Page* (FYP) pada media sosial memiliki kontribusi signifikan dalam memicu disrupsi nilai-nilai kebangsaan dan memperluas jurang polarisasi politik menjelang Pemilihan Umum 2029. Hal tersebut terjadi karena sistem rekomendasi konten yang bekerja secara otomatis cenderung mengunci pemikiran mahasiswa ke dalam gelembung informasi (*filter bubble*) dan ruang gema (*echo chamber*), sehingga memotong akses terhadap perspektif politik pembandingan yang lebih netral.

Kedua, pelaksanaan riset ini membuktikan bahwa di tengah tantangan arus disinformasi yang masif, mahasiswa Generasi Z memiliki kapasitas intelektual yang memadai untuk bertindak sebagai agen etika publik digital. Melalui tiga strategi konkret yaitu aktivitas verifikasi informasi (*fact checking*), moderasi diskusi siber yang mengedepankan rasionalitas, serta produksi konten edukasi kePemilihan Umuman yang netral mahasiswa secara praktis telah

mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pendidikan Pancasila. Tindakan menyaring informasi sebelum membagikannya merupakan manifestasi nyata dari aktualisasi Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) demi mencegah fragmentasi sosial, sekaligus pengamalan Sila ke-4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan) untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat di era siber dijalankan atas dasar tanggung jawab moral, bukan sekadar asas keviralan semata.

4.2 Rekomendasi Spesifik

Guna menyemai etika publik dan membentengi nilai kebangsaan dari disrupsi digital menyongsong Pemilihan Umum 2029, dirumuskan beberapa rekomendasi spesifik yang dapat diimplementasikan oleh pemangku kepentingan:

1. Rekomendasi bagi Mahasiswa: Diharapkan untuk mengembangkan kesadaran kognitif tingkat lanjut (*digital citizenship*) dan tidak mudah terpicu oleh konten-konten politik instan yang sengaja dipotong konteksnya. Mahasiswa harus membiasakan diri melakukan pemeriksaan silang (*cross checking*) ke platform berita terpercaya sebelum bereaksi atau menyebarkan konten yang melintas di FYP mereka.
2. Rekomendasi bagi Institusi Perguruan Tinggi: Disarankan kepada pihak universitas untuk menyusun kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang lebih adaptif terhadap teknologi. Langkah praktisnya dapat berupa penyelenggaraan lokakarya berkala mengenai literasi media, teknik mendeteksi hoaks, serta etika berkomunikasi di ruang siber bagi mahasiswa baru demi membangun karakter generasi yang cerdas dan berintegritas.

4.3 Limitasi Penelitian

Penulis menyadari bahwa artikel ilmiah ini masih memiliki keterbatasan (*limitation*) yang dapat memengaruhi generalisasi hasil. Fokus analisis riset ini sepenuhnya bertumpu pada data sekunder yang bersumber dari studi pustaka, jurnal ilmiah, dan pengamatan dokumen perilaku digital dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Akibatnya, penelitian ini belum mampu memotret dinamika psikologis, variasi tingkat literasi antarkampus, serta respon perilaku mahasiswa secara langsung di lapangan ketika mereka berhadapan dengan hoaks politik secara *real time*. Ketergantungan pada data konseptual-teoretis ini membuat kedalaman analisis perilaku praktis mahasiswa masih memerlukan pembuktian empiris yang lebih luas.

4.4 Penelitian Masa Depan (*Future Research*)

Berdasarkan limitasi yang telah dipaparkan, agenda penelitian masa depan (*future research*) diharapkan dapat meluas ke ranah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*), seperti penyebaran kuesioner berskala nasional maupun metode eksperimen digital untuk mengukur secara presisi tingkat literasi mahasiswa. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat berfokus pada analisis efektivitas konten edukasi buatan mahasiswa dalam memengaruhi keputusan politik pemilih pemula, sehingga model penguatan etika publik berbasis Pancasila dapat diuji secara empiris di tengah masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Tarmizi, "Algoritma Pemecah Belah Media Sosial: Polarisasi, Sensasionalisme, dan Krisis Literasi Digital," mudanews.com.

- [2] N. A. Kusumawati, R. O. Tumanggor, A. Isnaeny, and K. Ananda, "Pentingnya Literasi Digital untuk Menghindari Misinformasi Mahasiswa Generasi Z," vol. 6, no. 5, pp. 1202–1212, 2025.
- [3] A. M. Putri *et al.*, "Peran Gen Z dalam Mengimplementasikan Sila ke-4 Pancasila di Era Digital," vol. 9, pp. 39607–39616, 2025.
- [4] D. Zahira, B. Renata, and R. F. Aulia, "Partisipasi Politik Gen Z dalam Demokrasi," vol. 3, pp. 232–242, 2025.
- [5] H. Turahmi, Z. Azizah, and C. E. Mutia, "Peran Pemuda dalam Mewujudkan Demokrasi Digital : Analisis Praktik Komunikasi Politik di Media Sosial," vol. 3, no. 4, pp. 106–113, 2025.
- [6] F. Aini and D. Sundawa, "Analisis Partisipasi Gen Z Dalam Pilkada Sebagai Manifestasi Nilai Pancasila Analysis of Gen Z Participation in Pilkada as a Manifestation of Pancasila Values," vol. 3150, pp. 119–129, 2025.
- [7] S. Paranita, U. Islam, N. Raden, and F. Palembang, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Genarasi Z dalam Mewujudkan Good Citizenship di Perguruan Tinggi Islam," vol. 4, pp. 35–46, 2022.
- [8] P. S. Tarigan, M. Ulina, B. Ginting, D. Vincensius, and M. Siregar, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Bangsa Di Era Digital," vol. 3, no. 4, pp. 1610–1616, 2025.
- [9] K. T. Silitonga, D. Arini, S. Marsoit, M. C. Br, and S. Yunita, "Membangun Warga Negara Ideal : Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Indonesia," *Indones. J. Learn. Stud.*, vol. 5, no. 2, pp. 85–93, 2025.
- [10] A. B. Davany, B. G. P. Juneva, and N. A. Medyawati, "PENGUATAN ETIKA WARGA DIGITAL DI KALANGAN PRIA GEN Z DI," vol. 3, no. 1, pp. 1–10, 2025.
- [11] Dwijendra, "Peran Generasi Muda Dalam Menangkal Hoax Di Media Sosial Untuk Membangun Budaya Demokrasi Indonesia," vol. 1, no. 2, pp. 29–40, 2023.
- [12] D. R. Gultom *et al.*, "Upaya Pancasila Dalam Pencegahan Hoax Di Sosial Media Terhadap Mahasiswa," vol. 1, no. 4, 2023.
- [13] V. U. K. S. H, *Pendidikan Karakter Sebagai Pilar Bela Negara*.
- [14] C. Hidayat, I. Effendi, and F. I. Zarkasyi, "The Formation of Digital Literacy Among Gen Z Based on Local Wisdom Values to Counteract Cyber Terrorism Propaganda Pembentukan Literasi Digital Gen Z Berbasis Nilai Kearifan Lokal dalam Membendung Konten Propaganda Terorisme," vol. 7, no. 1, pp. 1–14, 2025, doi: 10.51486/jbo.v7i1.200.
- [15] R. Hidayat, "STRATEGI KAMPANYE KANDIDAT DALAM PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA 2024 : ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA TRADISIONAL DAN MEDIA SOSIAL," pp. 12–25, 2024.
- [16] M. M. K. Z. Aminaditya, "Membangun Budaya Politik Demokratis dan Penguatan Civil Society dalam Kehidupan Berbangsa," *Физиология Человека*, vol. 47, no. 4, pp.

124–134, 2021, doi: 10.31857/s013116462104007x.

- [17] Nike Firnanda Dwi Amelia, “PENGARUH TIKTOK SEBAGAI ARENA POLITIK DI KALANGAN GEN Z,” 2023.
- [18] “No Title,” 2023.
- [19] U. Dwijendra and I. Pendahuluan, “Peran Generasi Muda Dalam Menangkal Hoax Di Media Sosial Untuk Membangun Budaya Demokrasi Indonesia,” vol. 1, no. 2, pp. 29–40, 2023.
- [20] M. K. Z. Mauluda Aminaditya, “Membangun Budaya Pollitik Demokratis dan Penguatan Civil Society dalam Kehidupan Berbangsa,” 2022.
- [21] A. D. Irawan, “IMPLEMENTASI DEMOKRASI DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA,” in *BUNGA RAMPAI BUDAYA DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL*, 1st ed., S. R. Pudjiastuti, Ed., Kabupaten Bandung: Widina Media Utama, 2024, pp. 251–269.